

Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Standar Mutu Pendidikan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil

Effendi¹, Emilda Sulasmi², Muhammad Isman³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln Denai No 217 Medan Denai, Medan, Indonesia

Email : pendirina@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui fungsi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, 2). Fungsi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan standar sarana dan prasarana UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris. 3) Untuk mengetahui dampak peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana dalam meningkatkan standar mutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan jenis penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris menggunakan 4 (empat) fungsi manajemen menurut *George R. Terry* yakni POAC (*planning, Organizing, Actuating and Controlling*). 2). Fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan sudah dilakukan dengan baik. 3) Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan standar mutu di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris. Manajemen yang didukung kolaborasi bersama dan dibangun dengan solid dalam *mengupgrade* kompetensi serta profesionalisme dengan mengedepankan kedisiplinan serta tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing menjadi pondasi yang kokoh bagi peningkatan mutu pendidikan disekolah.

Kata Kunci: Manajemen Kepala sekolah, Standar Mutu

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) To determine the management function of school principals in improving the standards of educators and education personnel at UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, 2). The principal's management function is to improve the standards of UPTD SPF SMP Negeri 1 Lake Paris facilities and infrastructure. 3) To determine the impact of increasing the standards of educators and education personnel as well as facilities and infrastructure in improving quality standards. This research uses a qualitative approach with descriptive research methods and the type of research is a case study. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses data reduction, data presentation and drawing conclusions and triangulation. The research results show that: 1). The management function carried out by the principal at UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris uses 4 (four) management functions according to *George R. Terry* namely POAC (*planning, Organizing, Actuating and Controlling*). 2). The management functions carried out by the school principal according to the standards of educators and education staff have been carried out well. 3) Increasing the standards of educators and education personnel as well as the standards of facilities and infrastructure are very important factors in improving the quality standards at UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris. Management that is supported by joint collaboration and built solidly within *upgrade* competence and professionalism by prioritizing discipline and responsibility in carrying out the main tasks and functions of each becomes a solid foundation for improving the quality of education in schools.

Keywords: Principal management, quality standards.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah terhadap sektor pendidikan saat ini menjadi pembahasan yang menarik di kalangan masyarakat, baik itu para praktisi pendidikan, mahasiswa, tenaga pendidik dan sebagainya. Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Skala prioritas upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta perlindungan hak-hak guru melalui implementasi program sertifikasi guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Selanjutnya upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional adalah dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan inovatif pendidikan melalui program guru pembelajar atau sekarang yang dikenal dengan nama program guru penggerak (PGP), program guru SM3T, Pendidikan dan latihan (diklat) calon kepala sekolah (Cakap), diklat pengawas sekolah (Cawas), program literasi nasional, asesmen nasional (ANBK), program merdeka mengajar (PMM), program sekolah penggerak dan lain sebagainya. Berangkat dari keseriusan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat terwujudnya pendidikan yang bermutu, cakap, unggul, berakhlak dan berdaya saing dengan negara-negara lain di dunia.

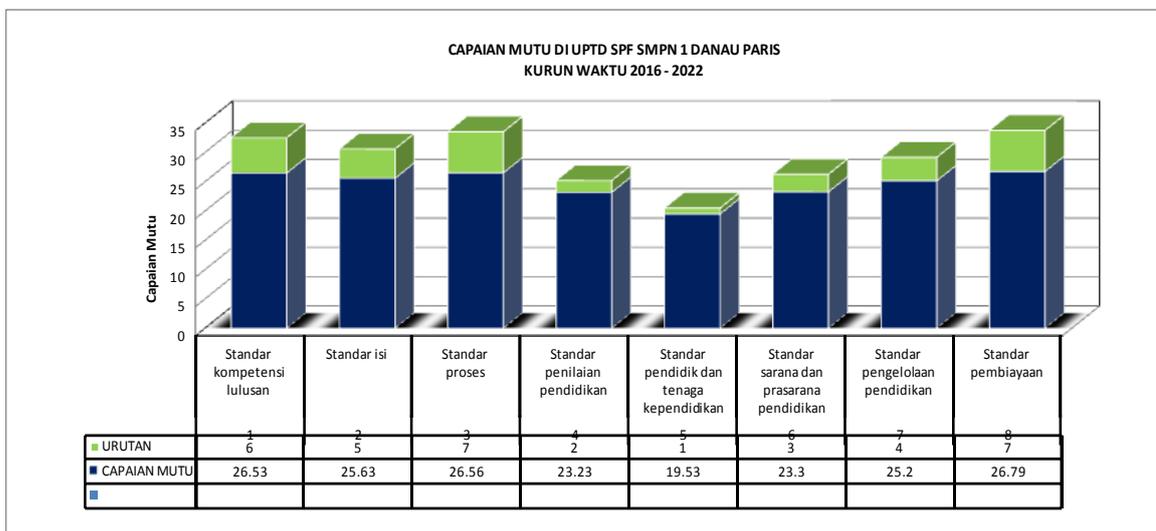
Terkait peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan menjelaskan berbagai aturan terkait dengan standar nasional pendidikan. Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup: a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar isi; c. Standar proses; d. Standar penilaian pendidikan; e. Standar tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar pengelolaan; h. Standar pembiayaan. Jika 8 (delapan) standar pendidikan tersebut terpenuhi dengan baik, tentunya peningkatan mutu pendidikan secara nasional juga akan meningkat. Lembaga pendidikan diantaranya sekolah yang memiliki standar unggul dan berkualitas tentunya diharapkan mampu bersaing secara nasional dan internasional, serta memiliki akar budaya dan nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kokoh, Syafarudin (2022). Menurut Handayani (2018) menyatakan bahwa BAN (Badan Akreditasi Nasional), sebagai badan independen yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab untuk melakukan akreditasi terhadap kelayakan pelayanan dan manajemen mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Hasil akreditasi nantinya dievaluasi ke dalam tiga tingkatan, yaitu A (amat baik), B (baik), dan C (cukup).

UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris adalah salah satu pendidikan formal di Kabupaten Aceh Singkil yang diharapkan nantinya mampu meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Namun berdasarkan data yang diperoleh di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris ditemukan bahwa adanya capaian standar mutu selama kurun waktu 7 tahun khususnya pada standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana masih sangat rendah. Hal ini didasarkan pada hasil mutu pada tahun 2016 adalah 4,56; 2017, 4,69; 2018, 4,84; dan 2019 tidak ada. (data tidak ditemukan/ kondisi vandemi corona); tahun 2020 = 5,02; tahun 2021 = 4,93. Pada tahun 2022 capaian mutu sekolah diambil data dari hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dari peserta didik kelas VIII yang juga menunjukkan hasil yang masih rendah. Selama 7 (tujuh) tahun, tentunya fungsi manajemen kepala sekolah dalam upaya meningkatkan standar mutu sangatlah penting. Manajemen yang dimaksud tentu terkait pada fungsi manajemen kepala sekolah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan pengawasan yang terus dilakukan.

Terkait tentang sarana dan prasarana jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki beberapa ketentuan seperti: a. Perbandingan luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per peserta didik untuk: 1. Sekolah dasar/ madrasah ibtdaiyah/ paket A/ bentuk lain yang sederajat; 2. Sekolah menengah

pertama/ madrasah tsanawiyah/ paket B/ bentuk lain yang sederajat yang tercantum pada pasal 12 Permendikbud Ristek nomor 22 Tahun 2023. Pada fungsi *Organizing* (pengorganisasian) tentunya kepala UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris telah menetapkan RKB (ruang kelas belajar) yang sesuai dengan kondisi siswa secara berjenjang mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Pemanfaatan sumber daya yang ada dengan segala keterbatasan tentunya bagi kepala sekolah merupakan tantangan tersendiri yang selayaknya perlu di apresiasi oleh dinas pendidikan dan masyarakat.

Dalam memberikan masukan, bimbingan atau arahan (*Actuating*) kepada bawahan agar senantiasa memahami situasi dan kondisi yang serba terbatas agar tetap semangat dalam mengajar dan membimbing siswa-siswi. Dengan keterbatasan yang ada tentunya menjadi salah satu masalah pada peningkatan standar mutu pendidikan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris. Pengarahan dan *controlling* (pengawasan) oleh kepala sekolah tetap terus dilakukan sebagai upaya memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan agar terus semangat dan berikhtiar agar kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris dapat terealisasi dengan baik. Kiranya pemenuhan standar sarana dan parasarana di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah.



Gambar 1 Capaian Mutu SMPN 1 Danau Paris

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui fungsi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, 2). Fungsi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan standar sarana dan prasarana UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris. 3) Untuk mengetahui dampak peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana dalam meningkatkan standar mutu.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Menurut Prasetia (2022) penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Karena dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan eksplorasi, menggambarkan dan menjelaskan dengan tujuan untuk memaparkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang ada di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang kepala sekolah berstatus PNS, 1 (satu) orang wakil kepala sekolah yang berstatus PNS, 1 (satu) orang guru mata pelajaran berstatus PNS, 2 (dua) orang guru berstatus PPPK (P3K), 1 (satu)

orang kepala tata usaha yang berstatus PNS, 1 (satu) orang pegawai perpustakaan berstatus non PNS, 1 (satu) orang Operator Sekolah (OPS) berstatus non PNS di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, 1 (satu) orang ketua komite sekolah dan 1 (satu) orang pengawas pembina sekolah. Selain itu, yang menjadi objek pada penelitian ini adalah standar mutu pendidikan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, khususnya standar pendidik dan kependidikan serta standar sarana dan prasarana. Penelitian ini dilakukan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Adapun teknik pengumpulan data mencakup observasi, interview, kuesioner, dokumentasi, atau kombinasi dari keempatnya. Uji keabsahan dari penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan cara triangulasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/ verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Kepala Sekolah pada guru dan pegawai tata usaha

1. Planning (Perencanaan)

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang manajemen kepala sekolah dalam mengelola guru dan pegawai tata usaha di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen kepala sekolah dengan guru dan tenaga kependidikan menggunakan 4 fungsi yakni *Planning, Organizing, Actuating and Controlling* serta dilakukan secara sistematis dan *kolaboratif* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kepala sekolah menerapkan 4 fungsi dalam *memanage* sebuah institusi pendidikan yakni sekolah karena dipandang sesuai dengan kondisi dan karakter lingkungan sekitar serta mudah dalam penerapannya.

Kepala sekolah dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah cenderung menjalankan fungsi manajemen dengan bagian-bagian yang lebih spesifik dengan jalur koordinasi masing-masing secara berjenjang. Hal ini dilakukan agar tidak saling bertabrakan kepentingan dan koordinasi antar sesama, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Pentingnya saling menghargai dan berkolaborasi demi tercapainya tujuan, visi dan misi sekolah yang pada akhirnya mampu meningkatkan standar mutu pendidikan di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris. Guru dan tata usaha diberikan kebebasan khusus menyusun perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjalankan program jangka pendek dan jangka menengah. Tentunya tujuan umum sesuai dengan visi dan misi sekolah akan menjadi rujukan bagi guru dan tata usaha dalam menjabarkan fungsi *planning* yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kebebasan tersebut tentunya terbatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menterjemahkan visi dan misi sekolah kearah yang lebih baik. Terkait program yang di tawarkan oleh kepala sekolah tentunya menjadi keharusan bagi setiap guru dan tenaga kependidikan agar mampu menjalankannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Keterlibatan warga sekolah, masyarakat termasuk komite sekolah dalam merumuskan tujuan tersebut menjadi berharga ketika semuanya saling menghargai dan berkolaborasi.

Kepala sekolah dalam menerapkan 4 fungsi manajemen tersebut tentunya bebas mengambil sikap (dinamis) sesuai dengan kondisi lapangan dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Misalkan pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris dilakukan melalui tahapan perencanaan tingkat menengah (*Middle level planning*) dan (*Low level Planning*). Pada tahapan *Middle level planning* ini lebih cenderung kepada administrasi yang mencakup bermacam-macam strategi untuk tercapainya target yang telah direncanakan. Pada level tersebut kepala sekolah memberikan penugasan disetiap bagian tugas dan bertanggung jawab atas masing-masing kinerjanya untuk tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan yang telah disepakati. Misalkan karena di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris hanya memiliki 9 Robel (Rombongan belajar) maka wakil kepala sekolah hanya diperkenankan 1 orang saja. Wakil kepala sekolah tersebut bertanggungjawab terhadap tugas yang ditanganinya termasuk mencakup kurikulum, tenaga pendidik dan kesiswaan. Kepala

laboratorium bertanggungjawab terhadap sarana dan prasana serta kepegawaian di lingkup terbatas ruang laboratorium. Kepala perpustakaan bertanggungjawab menyusun program kerja bidang perpustakaan bersama staf pustakawa untuk peningkatan standar dan pelayanan pada lingkup perpustakaan. Wali kelas sebagai guru yang bertanggungjawab atas kelas bersama sarana dan prasarana serta muird didalamnya. Sedangkan kepala tata usaha bertanggungjawab memimpin staf atau bawahannya dalam tugas pokok dan fungsi sebagai administrasi, perpustakaan dan sarana prasarana sekolah. Masing-masing tugas pokok dan fungsi tersebut diberikan kepercayaan untuk menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya menjadi rumusan bersama sebagai sebuah program yang disepakati bersama dan dijalankan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Dalam merencanakan sebuah program agar terlaksana dengan baik dan tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek serta kalkulasi atau perhitungan yang matang sehingga diharapkan mampu menjadi acuan dalam menjalankannya. Perencanaan bukan sekedar program yang ditulis di dokumen sekolah serta dipajang di dinding kantor kepala sekolah maupun dewan guru. Namun perencanaan tersebut mampu di implementasi dari sebuah program yang telah disepakati dan diharapkan menjadi target yang harus dicapai dalam upaya peningkatan standar mutu disekolah.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pada tahapan pengorganisasian (*Organizing*), kepala sekolah mendesain atau mengkoordinir berbagai program untuk dieksekusi bersama dengan tugasnya masing-masing pada awal semester dalam rapat pembagian tugas bersama, seperti adanya pemilihan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan, pemilihan bendahara sekolah, bagian administrasi (TU), pemilihan perpustakaan sekolah, pemilihan wali kelas, pembagian tugas guru mata pelajaran, pemilihan pembina OSIS, pembina ROHIS dan lain sebagainya.

Dalam pemilihan wakil kepala sekolah tentunya berdasarkan kriteria yang ada termasuk pangkat atau golongan serta senioritas dan kebijaksanaan dalam bersikap. Wakil kepala sekolah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya terkait berbagai macam persoalan siswa dan terkait perkembangan dinamika kurikulum nasional dan daerah. Pembagian tugas guru juga menjadi pertimbangan yang paling utama dalam menjalankan 4 fungsi manajemen yakni pengorganisasian. Setiap guru memperoleh pembagian jumlah jam mengajar (JJM) bagi ASN minimal sebanyak 24 jam tatap muka per minggunya. Dari 10 (sepuluh) mata pelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum 2013 masing-masing guru ASN maupun non ASN dibagi sesuai dengan proporsinya. Ketika pembagian jumlah jam mengajar tersebut terbentur karena keterbatasan sumber daya manusia maka disinilah peran kepala sekolah diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan tersebut.

Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah dan bendaharan sekolah berkoordinasi dan mengambil kebijakan dengan merekrut guru baru non ASN untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut. Tentunya kepala sekolah akan memberikan dan mengajukan permohonan penambahan guru kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil melalui perekrutan ASN pada tahapan lanjutan. Apabila tidak terealisasi maka berdasarkan kesepakatan bersama setiap guru akan ditambah jumlah jam mengajarnya maksimal sampai dengan 40 jam per tatap muka. Pembagian tugas juga berlaku kepada tenaga kependidikan termasuk kepala perpustakaan dan kepala laboratorium yang diberi tanggungjawab mengelola ruangnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Semua pengorganisasian tersebut di susun dan di sahkan dengan diterbitkannya surat keputusan oleh kepala sekolah dengan hak dan kewajiban masing-masing untuk selanjutnya dilaporkan kepada dinas pendidikan Kab. Aceh Singkil melalui pengawas pembina sekolah.

3. *Actuating* (Pengarahan)

Dalam menjalankan atau mengelola sebuah organisasi pendidikan, fungsi *Actuating* juga memiliki peranan yang sangat penting. Seorang kepala sekolah di tuntutan untuk mampu sebagai *leader* yang memiliki skill dan terutama *publik speaking* dalam berkomunikasi menggerakkan dan mendorong bawahan agar berjalan beriringan bekerja secara sistematis agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. Dari temuan penelitian kepada Kepala sekolah di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris dalam mengarahkan bawahan cenderung berorientasi kepada aturan yang ada dan senantiasa selalu berhati-hati dalam bertutur kata dan bersikap. Dalam fungsi manajemen *actuating* ini biasanya kepala sekolah melakukannya secara bersamaan dengan penerapan fungsi *controlling* ketika melakukan monitoring dan evaluasi. Fungsi mengarahkan ini sering juga melibatkan wakil kepala sekolah dalam melakukan supervisi. Harapannya ketika fungsi *actuating* ini berjalan dengan baik dan diterima oleh bawahan, maka secara otomatis bawahan akan bekerja dengan baik dan ikhlas tanpa ada paksaan. Pendekatan persuasif dengan komunikasi yang baik merupakan modal dasar seorang kepala sekolah untuk menggerakkan bawahannya dalam bekerja.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dan staf tata usaha dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Kepala sekolah dalam melakukan pengawasan ketika memonitoring dan evaluasi (*monev*) kepada guru didalam kelas dalam proses belajar mengajar memberikan pendelegasian kepada wakil kepala sekolah. Kepala sekolah ketika memberikan pengawasan (*controlling*) kepada tenaga kependidikan khususnya staf tata usaha dengan cara mendelegasikan tugas pengawasan kepada kepala tata usaha. Pengawasan berjenjang yang dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan kepada profesionalisme dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pengalaman yang diperoleh oleh kepala sekolah sebelumnya dalam mengelola sebuah institusi pendidikan seperti sekolah sebenarnya baik, namun yang menjadi catatan adalah tidak semua guru maupun tata usaha memiliki watak dan pemahanan yang sama atas konsep pola manajemen yang ada. Berbagai pendekatan persuasif sesuai dengan lingkungan kerja, budaya kerja dan kepribadian turut memberikan kontribusi dalam peningkatan standar mutu khususnya tenaga pendidik dan kependidikan disebuah sekolah. Menurut beberapa orang guru dan staf tata usaha dalam bekerja juga mengakui perlu adanya pendekatan khusus bagi kepala sekolah kepada bawahannya dalam mencapai tujuan, visi dan misi sekolah.

Controlling yang dilakukan kepala sekolah di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris tentunya semata-mata untuk menetapkan standar mutu bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan tujuan melakukan refleksi mauoun umpan balik berjalan atau tidak program yang telah direncanakan diawal. Dalam konteks pendidikan, istilah *controlling* (pengawasan) biasa disebut dengan monitoring dan evaluasi (*monev*) pendidikan dan pengajaran. Peningkatan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan disekolah negeri terbatas dan akan terpenuhi ketika proses rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara) berupa penerimaan PNS maupun P3K dilaksanakan.

3.2 Manajemen Kepala Sekolah pada Standar Sarana dan Prasarana

1. *Planning* (Perencanaan)

Pemanfaatan aset yang ada secara maksimal menjadi modal dasar kepala sekolah ketika terbentur akan masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Sesuai dengan juknis yang ada, pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasional) tentunya tidak diperkenankan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasana yang besar. Setiap tahunnya kebutuhan ruang kelas belajar dengan *mobillernya* menjadi perhatian khusus yang akan dibahas dalam rapat internal dengan seluruh dewan guru maupun rapat eksternal yang melibatkan dinas pendidikan dan komite sekolah. Perencanaan yang disusun oleh kepala sekolah bersama dewan guru tentunya dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Bentuk perencanaan yang dilakukan tersebut

tentunya hanya terbatas pemanfaatan aset yang ada seperti ruang kantor yang dialih fungsikan menjadi ruang kelas belajar. Sementara mushollah yang baru direhab juga dialih fungsikan menjadi kantor dewan guru. Berbagai kelemahan tersebut tentunya apabila disikapi dengan bijak dengan menerapkan fungsi *planning* (perencanaan) dengan matang tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan mutu terutama sarana dan prasana di sekolah.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Selanjutnya pada penerapan fungsi *Organizing* (pengorganisasian) yang dilakukan oleh kepala sekolah di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris telah menetapkan ruang kelas belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa secara berjenjang mulai dari kelas VII sampai dengan kelas IX. Pemanfaatan sumber daya yang ada dengan segala keterbatasan tentunya bagi kepala sekolah merupakan tantangan tersendiri yang selayaknya perlu di apresiasi oleh dinas pendidikan dan masyarakat.

3. *Actuating* (Pengarahan)

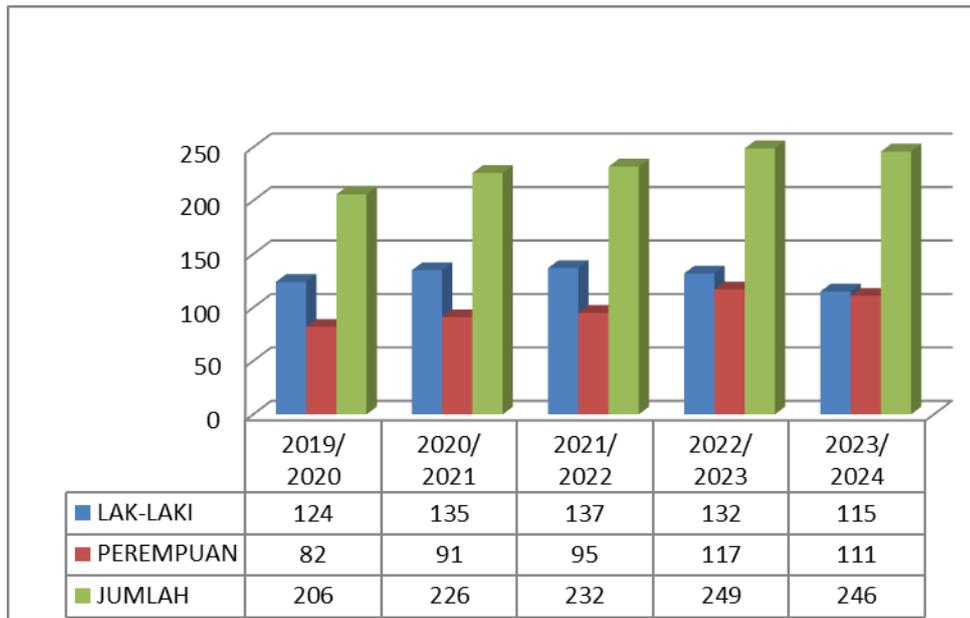
Dalam memberikan masukan, bimbingan atau arahan (*Actuating*) kepada bawahan agar senantiasa memahami situasi dengan kondisi yang serba terbatas agar tetap semangat dalam mengajar dan membimbing siswa-siswi. Dengan keterbatasan yang ada menjadi motivasi tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris. Pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris tetap terus dilakukan sebagai upaya memotivasi guru dan tata usaha agar terus semangat dan berikhtiar agar kebutuhan sarana dan prasarana di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris bisa terealisasi dengan baik. Kiranya pemenuhan standar sarana dan prasarana di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Fasilitas dan perlengkapan yang memenuhi standar nasional pendidikan adalah merupakan syarat adanya peningkatan mutu di sekolah yang diharapkan nantinya dapat tercapai tujuan pembelajaran yang berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Hal ini sesuai pasal 5 Permendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023 tentang sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah dikatakan bahwa sarana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam melakukan *controlling* (pengawasan) tentunya kepala sekolah memiliki berbagai dokumen acuan dan format pencatatan data yang tidak terlepas dari pedoman dan arahan kepala sekolah. Kepala tata usaha dalam menjalankan tugas dan kewajibannya khusus terkait sarana dan prasarana juga dibantu oleh beberapa orang staf tata usaha. *Controlling* yang dilakukan secara berkala adalah merupakan upaya untuk menjaga serta mengevaluasi pemanfaatan sekaligus merawat setiap aset berupa sarana dan prasarana yang ada agar berdaya guru dalam proses pembelajaran dan bagi peningkatan standar mutu pendidikan disekolah. Kiranya kerja keras dan kolaborasi bersama antara kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, dinas pendidikan, para murid dan orang tua siswa perlu menjadi perhatian khusus yang diharapkan adanya sinergisitas dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan tentunya harus dimulai dari adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai top manajer disekolah.

Dampak penerapan 4 (empat) fungsi manajemen yang dilakukan dalam meningkatkan standar mutu pendidikan khususnya pada guru dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana terlihat dari jumlah siswa mendaftar pada tahun pelajaran 2023/ 2024 yang terus mengalami peningkatan yakni berjumlah 246 siswa dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 206 orang siswa. Namun dilihat dari kualitas siswa-siswi di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris masih tergolong rendah. Hal ini diketahui belum banyak terlihat berbagai piagam penghargaan atau piala yang dapat dibanggakan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, baik di tingkat nasional, provinsi, bahkan kabupaten.



Gambar 2 Data Jumlah Peserta Didik UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris

3.3 Manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan standar sarana dan prasarana UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris

Kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan berjalannya sistem agar bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan pemetaan aset yang dilakukan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris terdapat 9 kelas lengkap dengan kursi dan meja untuk guru dan murid. Pemanfaatan ruang kelas belajar secara maksimal dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Setiap wali kelas juga bertanggungjawab menjaga dan memastikan kenyamanan murid-murid dalam belajar dikelas.

Berbagai ikhtiar terus dilakukan oleh kepala sekolah agar kelengkapan sarana dan prasarana terealisasi dengan baik di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris salah satunya dengan menyampaikan ke pusat kementerian yang membidangi sarana dan prasarana melalui Dapodik (data pokok pendidik), selanjutnya permohonan melalui proposal dan audiensi ke dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil juga rutin dilakukan. Namun melalui dinas pendidikan diinformasikan kepada kepala sekolah bahwa penambahan RKB (ruang kelas belajar) dan kantor guru untuk UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris akan dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024.

Dari awal berdiri UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 pembangunan 3 (tiga) RKB (Ruang Kelas Belajar) terdapat beberap bangunan semi permanen menjadi permanen. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan jumlah siswa yang mencapai 9 (sembilan) rombel (Rombongan Belajar) dari ketersediaan RKB (Ruang Kelas Belajar) yang berjumlah 8 (delapan) ruangan, terpaksa harus ditambah dengan menggunakan Ruang Laboratorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang dialih fungsikan menjadi RKB (Ruang Kelas Belajar). Selanjutnya untuk ruang ibadah sholat atau Musholla juga dialih fungsikan menjadi ruang kantor guru dan kepala sekolah yang digabung menjadi satu.

Padahal kalau merujuk pada ketentuan sarana pada peraturan Kemendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023 tentang sarana dan prasarana jenjang pendidikan menengah diuraikan bahwa Ketentuan sebagaimana pada pasal 5 tentang sarana diantaranya harus memiliki ketentuan: a)

Sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. b) Memperhatikan kebutuhan peserta didik, karakteristik dengan memperhatikan keragaman budaya (*culture*), jenis kelamin (*gender*), bahasa, agama dan kepercayaan. c) Memperhatikan kebutuhan akomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas. d) Memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar satuan pendidikan. e) Keamanan, kesehatan, dan keselamatan; f) Ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Selanjutnya terkait tentang sarana dan prasarana jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki beberapa ketentuan seperti: a. Perbandingan luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per peserta didik untuk: 1. Sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ paket A/ bentuk lain yang sederajat; 2. Sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah/ paket B/ bentuk lain yang sederajat yang tercantum pada pasal 12 Permendikbud Ristek nomor 22 Tahun 2023. Adapun untuk ruang tata usaha di alih fungsikan dari ruang kecil UKS (Unit Kesehatan Siswa). Hal ini tentunya dilakukan melalui pertimbangan dan *Planning* (perencanaan) yang matang setelah diskusi yang panjang dari seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Pada fungsi perencanaan, berbagai ide atau gagasan pemenuhan sarana dan prasarana disusun oleh kepala sekolah untuk dimasukkan dan dianggarkan dalam RAPBS (rencana anggaran pendapatan belanja sekolah).

Pada fungsi *Organizing* (pengorganisasian) tentunya kepala UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris telah menetapkan RKB (ruang kelas belajar) yang sesuai dengan kondisi siswa secara berjenjang mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Pemanfaatan sumber daya yang ada dengan segala keterbatasan tentunya bagi kepala sekolah merupakan tantangan tersendiri yang selayaknya perlu di apresiasi oleh dinas pendidikan dan masyarakat.

Dalam memberikan masukan, bimbingan atau arahan (*Actuating*) kepada bawahan agar senantiasa memahami situasi dan kondisi yang serba terbatas agar tetap semangat dalam mengajar dan membimbing siswa-siswi. Dengan keterbatasan yang ada tentunya menjadi salah satu masalah pada peningkatan standar mutu pendidikan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris. Pengarahan dan *controlling* (pengawasan) oleh kepala sekolah di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris tetap terus dilakukan sebagai upaya memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan agar terus semangat dan berikhtiar agar kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris dapat terealisasi dengan baik. Kiranya pemenuhan standar sarana dan prasarana di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Salah satu syarat adanya peningkatan mutu di sekolah yang diharapkan nantinya dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas dan pada akhirnya pada meningkatkan mutu pendidikan secara nasional adalah dengan pemenuhan akan sarana dan prasarana yang baik dan sesuai ketentuan. Berdasarkan peraturan Kemendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023 tentang sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dikatakan bahwa sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

3.4 Dampak manajemen kepala sekolah pada guru dan pegawai tata usaha serta sarana dan prasarana di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris

Pengelolaan manajemen yang baik dalam meningkatkan 8 (delapan) standar pendidikan nasional diharapkan mampu meningkatkan standar mutu pendidikan di sekolah. Tentunya dalam meningkatkan standar mutu di sebuah lembaga pendidikan termasuk sekolah tidaklah mudah. Banyak indikator pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam peningkatan standar mutu pendidikan tersebut. Penjabaran fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah membutuhkan tingkat kolaborasi atau kerjasama yang baik sehingga diharapkan berdampak pada perubahan peningkatan standar mutu yang lebih di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris.

Melalui hasil observasi, wawancara dan data diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris, terdapat 2 (dua) standar yang memiliki nilai yang sangat rendah yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana. Namun bila dibandingkan pada capaian standar mutu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sudah terlihat mulai ada peningkatan. Misalnya, pada tahun 2016 capaian standar pendidik dan kependidikan berkisar 3,94 dan pada tahun 2020 sudah mencapai 5,55 walaupun masih jauh dari nilai rata-rata capaian standar mutu yang ditentukan oleh pemerintah yakni 7 (tujuh). Kepala sekolah saat ini yakni bapak Juliadin, S.Pd.I terus berupaya mendongkrak pencapaian tersebut dengan terus berkoordinasi kepada dinas pendidikan dan kebudayaan agar pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan bagi guru seperti diklat calon guru penggerak dan lain sebagainya.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris menggunakan 4 (empat) fungsi menurut George R. Terry yakni POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling). Pada fungsi manajemen di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan standar mutu guru dan tenaga kependidikan sudah dilakukan dengan baik. Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan standar mutu di UPTD SPF SMPN 1 Danau Paris. Hal ini diketahui ketika kepala sekolah sudah mampu mengorganisir sumber daya yang ada di UPTD SPF SMP Negeri 1 Danau Paris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2021). Manajemen Kepala Sekolah dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan Guru*. 2 (1).
- Aktar, S.,dkk. (2022). Kinerja kepala sekolah dalam implementasi Program manajemen berbasis sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 14 Binjai), *Jurnal Guru Kita*. 6 (2).
- Amiruddin T., dkk (2021). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: K-Media.
- Amini., dkk. (2021). Analisis Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru di SMP Negeri 13 Binjai. *Jurnal, JGK (Jurnal Guru Kita)*. 6 (1).
- Arifin, M., dkk. (2020). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh Untuk Millennial. Sukabumi: Haura Publishing.
- Arifin, M. dkk. (2017). Manajemen Pendidikan Masa Kini. Medan: UMSU Press.
- Azmi, U. (2018). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 18 (2).
- Azzahra, D. (2022) . Manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Ibnu Sina Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 8 (2)
- Baharu, H. (2017). Manajemen Mutu Pendidikan, Ikhtiar dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui pendekatan Balanced Scorecard. Tulungagung : Akademia Pustaka.
- Bungin, B. (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Emilda, S. (2020). Manajemen dan Kepemimpinan. Depok : Rajawali Pers.
- Elfrianto. (2016). Manajemen Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Edutech Volume*. 2 (2).
- Ellianis. (2022). Manajemen kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri 004 kecamatan salo Kabupaten Kampar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 10 (1)
- Fitrah, M., dkk. (2017). Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat : CV Jejak.

- Handayani., dkk. (2018). Akreditasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Mutu Satuan Pendidikan. Jakarta : Puslitjakbud.
- Lisnawati, R. (2017). Fungsi Manajemen Kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktek)*, 2 (2)
- Mulyasa, E. (2018). Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, TJ., (2016). School Principal Management in an Effort to Increase Achievement in Elementary Schools", *Equatorial Education and Learning. Journal (JPPK)*. 5 (4).
- Prasetya, I.(2022). Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktek. Medan : UMSU Press.
- Prasojo, L. (2016). Manajemen Mutu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Samosir, L.H., Sulasmi, E., Prasetya, I. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesional Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kreativitas Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*. 4(2), 119-128.
- Sihite, M. (2022). Manajemen Kepala Sekolah dalam mengembangkan sekolah berbasis teknologi di SMPN 5 satu atap kerajaan pardomuan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran UMSU*. 3 (2).
- Sirait, H., Prasetya, I., Amini. (2023). Efektivitas Manajemen Sekolah Dalam Mengimplementasikan Diversifikasi Kurikulum (Studi Kasun di SMP Negeri 2 Kota Sibilga). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*, 4(2) 114-120
- Sormin, D. (2017). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 29 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*. 2 (1).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
- Suvriadi., dkk. (2022). Pengantar Manajemen Pendidikan. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Syafaruddin., dkk. (2022). Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Medan : CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Thoha, M. (2013). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tukiran, M. (2021). Total Quality Management untuk organisasi pendidikan. Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Zahiq, M. (2022). Manajemen kepala sekolah sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*. 6 (1).
- Zulti, E. (2022). Manajemen kepala sekolah sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru". *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*. 6 (1)